

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat dua jenis bank umum, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Usaha pokoknya meliputi menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan dan layanan keuangan lain yang mendukung arus pembayaran dan peredaran uang.¹ Layanan bank syariah berlaku untuk semua lapisan masyarakat, tidak terbatas pada umat Islam. Bank syariah berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak yang membutuhkan.² Peran ini menyatukan sektor keuangan dengan sektor riil dan menjadi faktor penting bagi perkembangan ekonomi nasional. Bank syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).³

BPRS merupakan lembaga keuangan Syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Produk BPRS terdiri atas dua jenis, pertama penyaluran dana berupa pembiayaan, kedua penghimpunan dana melalui tabungan, dan deposito. Karena itu bank syariah harus mampu menyalurkan dana secara efektif agar dapat terus berkembang.⁴

¹ Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Widina, 2021), hlm. 20.

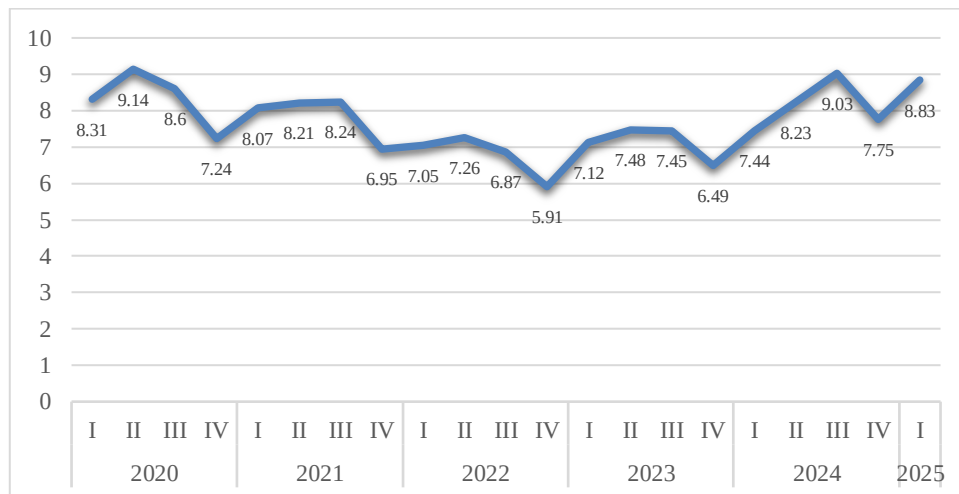
² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* (Ciputat: GP Press Group, 2014), hlm. 119-120.

³ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 27-28.

⁴ Wahyi Busyro, Rika Septianingsih, Putri Jamilah, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2020), hlm. 47.

Semakin besar pembiayaan yang diberikan semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung, risiko ini diukur dengan rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Tidak semua pembiayaan yang disalurkan bank syariah masuk kategori sehat, sebagian diantaranya berkualitas buruk atau bermasalah. Fenomena ini sering muncul karena penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas utama perbankan syariah.⁵ Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Adapun perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS selama periode penelitian ini dijelaskan pada gambar 1.1 sebagai berikut.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Gambar 1. 1
Grafik NPF BPRS 2020-2025

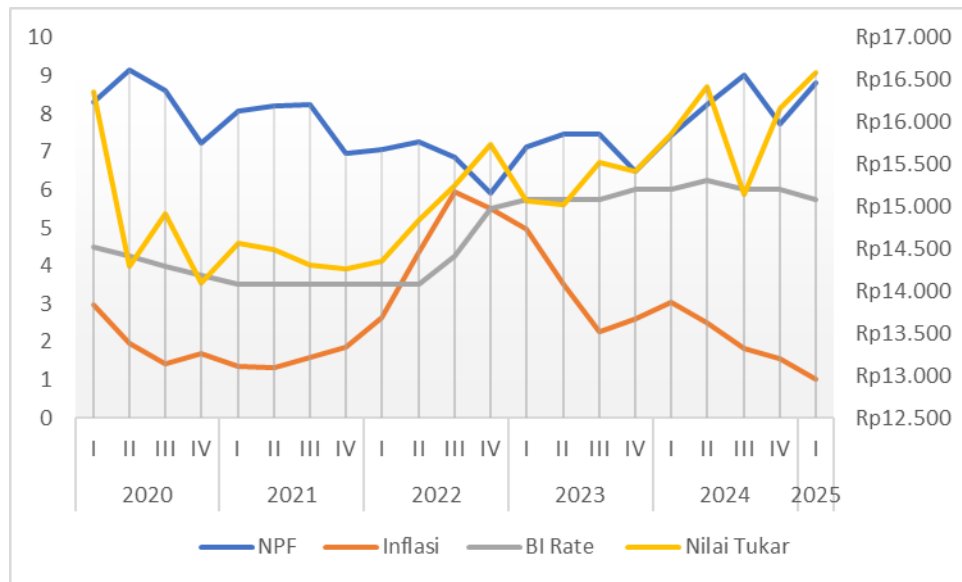
⁵ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 89-90.

Berdasarkan gambar 1 tingkat NPF BPRS di Indonesia periode 2020 hingga 2025 berada di atas 5 persen. Merujuk pada POJK Nomor 15 menjelaskan bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan membahayakan kelangsungan usaha apabila rasio pembiayaan bermasalah mencapai lebih dari 5%.

Pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal, baik yang berasal dari pihak nasabah maupun dari lembaga keuangan itu sendiri. Faktor internal meliputi buruknya karakter nasabah, kecerobohan dalam pengelolaan usaha, serta kelemahan analisis pembiayaan oleh pihak bank. Sementara faktor eksternal mencakup kondisi makroekonomi, situasi politik, serta kejadian tidak terduga seperti bencana alam.⁶

Di antara faktor eksternal tersebut, kondisi makroekonomi menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap sector perbankan termasuk BPR Syariah. Indikator yang sering dikaitkan dengan kualitas pembiayaan antara lain inflasi, nilai tukar, dan bi rate. Berikut merupakan perkembangan NPF, Inflasi, Nilai Tukar dan BI Rate pada tahun 2020-2025.

⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 91.



Sumber: Data diolah (2025)

Gambar 1. 2
Grafik NPF, Inflasi, Nilai Tukar, BI Rate 2020-2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa NPF BPR Syariah mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada awal 2020-2021 NPF mengalami penurunan, kemudian meningkat pada 2023-2024 sebelum mengalami penurunan kembali pada periode akhir. Inflasi selama periode penelitian berada pada tingkat terkendali, meskipun sempat meningkat pada tahun 2022. BI Rate mengalami penurunan selama pandemi hingga mencapai 3,5%, kemudian meningkat sejak 2022 hingga mencapai 6-6,25% sebagai bagian dari kebijakan moneter. Sementara itu nilai tukar melemah pada beberapa periode khususnya setelah tahun 2022.

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi NPF adalah inflasi. Berikut ini adalah data Inflasi dan NPF (*Non Performing Financing*).

Tabel 1. 1
Data Inflasi dan NPF BPRS Di Indonesia Tahun 2020-2025

Tahun	Triwulan	Inflasi (%)		NPF (%)	
2020	I	2,96		8,31	
	II	1,96	↓	9,14	↑
	III	1,42	↓	8,6	↓
	IV	1,68	↑	7,24	↓
2021	I	1,37	↓	8,07	↑
	II	1,33	↓	8,21	↑
	III	1,6	↑	8,24	↑
	IV	1,87	↑	6,95	↓
2022	I	2,64	↑	7,05	↑
	II	4,35	↑	7,26	↑
	III	5,95	↑	6,87	↓
	IV	5,51	↓	5,91	↓
2023	I	4,97	↓	7,12	↑
	II	3,52	↓	7,48	↑
	III	2,28	↓	7,45	↓
	IV	2,61	↑	6,49	↓
2024	I	3,05	↑	7,44	↑
	II	2,51	↓	8,23	↑
	III	1,84	↓	9,03	↑
	IV	1,57	↓	7,75	↓
2025	I	1,03	↓	8,83	↑

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Keterangan:

↑ = Naik

↓ = Turun

Tabel 1 menunjukkan data inflasi dan NPF pada periode 2020-2025 terlihat bahwa pergerakan keduanya tidak selalu sejalan, yang dimana menurut teori apabila Inflasi meningkat maka rasio NPF juga akan meningkat, begitupula sebaliknya. Pada triwulan II tahun 2020 inflasi menurun dari 2,96% menjadi 1,96%, namun NPF justru meningkat dari 8,31% menjadi 9,14%. Begitupula pada tahun 2020 sampai 2025 dapat dilihat pada beberapa triwulan

ketika inflasi menurun NPF mengalami kenaikan, dan saat inflasi meningkat NPF justru mengalami penurunan.

Inflasi termasuk salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan. Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kondisi inflasi yang tinggi seringkali melemahkan daya beli masyarakat, mengurangi kemampuan menabung, serta menekan modal kerja pelaku usaha.⁷ Ketika daya beli turun sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah, beban ekonomi meningkat dan berpengaruh pada kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban angsuran. Situasi ini mendorong kenaikan rasio pembiayaan bermasalah di BPRS. Inflasi yang tidak terkendali juga memperlambat pertumbuhan ekonomi karena biaya operasional usaha naik dan laba usaha menurun sehingga mengakibatkan kelancaran pembayaran pembiayaan terganggu.⁸

Faktor yang mempengaruhi NPF selanjutnya yaitu nilai tukar atau kurs. Secara teori apabila nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat maka pembiayaan bermasalah akan menurun. Hal ini karena penguatan rupiah menunjukkan kestabilan ekonomi dan kepercayaan pasar yang meningkat. Sebaliknya pelemahan nilai tukar rupiah (kurs naik) dapat meningkatkan biaya impor dan menekan sektor usaha

⁷ Arniati, *Teori Ekonomi Mikro* (Gowa: Global-RCI, 2021), hlm. 42.

⁸ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro: Teori Soal Dan Penyelesaiannya* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 158.

terutama usaha kecil menengah (UMKM), dan akhirnya bisa meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.⁹ Adapun perkembangan nilai tukar rupiah dan tingkat NPF selama periode penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2
Data Nilai Tukar dan NPF BPRS Di Indonesia Tahun 2020-2025

Tahun	Triwulan	Nilai Tukar		NPF (%)	
2020	I	Rp16.367		8,31	
	II	Rp14.302	↓	9,14	↑
	III	Rp14.918	↑	8,6	↓
	IV	Rp14.105	↓	7,24	↓
2021	I	Rp14.572	↑	8,07	↑
	II	Rp14.496	↓	8,21	↑
	III	Rp14.307	↓	8,24	↑
	IV	Rp14.269	↓	6,95	↓
2022	I	Rp14.349	↑	7,05	↑
	II	Rp14.848	↑	7,26	↑
	III	Rp15.247	↑	6,87	↓
	IV	Rp15.731	↑	5,91	↓
2023	I	Rp15.062	↓	7,12	↑
	II	Rp15.026	↓	7,48	↑
	III	Rp15.526	↑	7,45	↓
	IV	Rp15.416	↓	6,49	↓
2024	I	Rp15.853	↑	7,44	↑
	II	Rp16.421	↑	8,23	↑
	III	Rp15.138	↓	9,03	↑
	IV	Rp16.162	↑	7,75	↓
2025	I	Rp16.588	↑	8,83	↑

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Keterangan:

↑ = Naik

↓ = Turun

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi sepanjang periode penelitian. Pada tahun 2022 kurs melemah dari

⁹ Arniati, *Teori Ekonomi Mikro*, hlm. 34.

Rp14.299 menjadi Rp15.731 per USD. Meskipun terjadi pelemahan nilai tukar, NPF justru menurun dari 7,24% menjadi 5,91%. Nilai tukar rupiah yang berfluktuasi memengaruhi kondisi pembiayaan di BPR Syariah, pelemahan rupiah meningkatkan harga barang impor terutama bahan baku, sehingga menambah beban biaya produksi pelaku usaha. Tekanan biaya tersebut menurunkan profitabilitas dan memperkecil kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Oleh karena itu nilai tukar menjadi variabel penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis tingkat NPF di BPR Syariah.¹⁰

Faktor makro ekonomi selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah adalah suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Secara teori ketika BI Rate mengalami kenaikan maka biaya pinjaman akan ikut meningkat. Kondisi ini dapat membuat masyarakat atau pelaku usaha menunda pengajuan pembiayaan baru dan berpotensi menurunkan kemampuan bayar bagi nasabah yang sudah memiliki pembiayaan. Adapun perkembangan BI Rate dan tingkat NPF selama periode penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3
BI Rate Tahun 2020-2025

Tahun	Triwulan	BI Rate (%)		NPF(%)	
2020	I	4,5		8,31	
	II	4,25	↓	9,14	↑
	III	4	↓	8,6	↓
	IV	3,75	↓	7,24	↓
2021	I	3,5	↓	8,07	↑

¹⁰ Aziz Septiatin, Riduwansyah, dan Helisia Krisdayanti, “Analisis Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS di Indonesia Periode 2014-2021”, *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 180-196.

Tahun	Triwulan	BI Rate (%)		NPF(%)	
	II	3,5	→	8,21	↑
	III	3,5	→	8,24	↑
	IV	3,5	→	6,95	↓
2022	I	3,5	→	7,05	↑
	II	3,5	→	7,26	↑
	III	4,25	↑	6,87	↓
	IV	5,5	↑	5,91	↓
2023	I	5,75	↑	7,12	↑
	II	5,75	→	7,48	↑
	III	5,75	→	7,45	↓
	IV	6	↑	6,49	↓
2024	I	6	→	7,44	↑
	II	6,25	↑	8,23	↑
	III	6	↓	9,03	↑
	IV	6	→	7,75	↓
2025	I	5,75	↓	8,83	↑

Sumber: Bank Indonesia (2025)

Keterangan:

↑ = Naik

↓ = Turun

→ = Tetap

BI Rate berfungsi sebagai suku bunga acuan kebijakan moneter yang memengaruhi tingkat imbal hasil perbankan, termasuk margin pembiayaan di bank syariah. Kenaikan BI Rate akan meningkatkan biaya dana, sehingga bank perlu menyesuaikan margin pembiayaan agar tetap menjaga profitabilitas. Hal ini menyebabkan nilai pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat berkurang dan potensi pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat, karena beban cicilan menjadi lebih berat bagi nasabah.¹¹ Dengan demikian secara teori, BI Rate

¹¹ Detri Karya, Syamri Samsudin, *Makro ekonomi: Pengantar Untuk Manajemen* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

dapat menjadi indikator penting bagi tinggi rendahnya NPF pada perbankan syariah.

Namun berdasarkan pengamatan pada tabel perkembangan BI Rate dan NPF periode 2020–2025, terlihat bahwa hubungan keduanya tidak selalu searah seperti teori. Pada beberapa triwulan kenaikan BI Rate justru diikuti dengan penurunan NPF dan sebaliknya. Misalnya pada tahun 2022 meskipun BI Rate meningkat dari 3,5% menjadi 5,5%, tingkat NPF justru menurun dari 7,26% menjadi 5,91%. Dengan demikian hasil pengamatan menunjukkan bahwa dampak perubahan BI Rate terhadap NPF bersifat tidak konsisten dari triwulan ke triwulan. Hanya beberapa periode seperti triwulan III 2020, triwulan I 2023, dan triwulan I 2024 yang memperlihatkan hubungan sesuai teori (positif), sedangkan sebagian besar periode menunjukkan hubungan yang bertentangan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa referensi mengenai inflasi, nilai tukar, dan BI Rate dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai gambaran untuk mempermudah penelitian.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan NPF. Temuan Nisa dkk.¹² menunjukkan inflasi berdampak positif terhadap NPF namun penelitian yang dilakukan oleh Rineu¹³ menunjukan inflasi tidak

¹² Nisa Arinda, Iwan Setiawan, dan Fifi Afyanti Triuspitorini, “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Indonesia”, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 480-490.

¹³ Rineu Ardiana Sholehah, Teny Badina, dan Muhammad Ainun Najib, “Pengaruh Inflasi, Kurs Nilai Tukar Rupiah, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi

bepengaruh terhadap NPF. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rosela¹⁴ dan Noviatul¹⁵ menemukan pengaruh nilai tukar tidak selalu signifikan terhadap NPF. Kemudian penelitian yang mengungkapkan hubungan antara BI Rate dan NPF oleh Najiatusun¹⁶ menunjukkan bahwa kenaikan BI Rate berpengaruh positif terhadap peningkatan NPF. Sementara penelitian oleh Fadhlurrahman, menemukan bahwa pengaruh BI Rate tidak berpengaruh terhadap NPF.¹⁷

Dari fenomena diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian yang terjadi sesuai dengan teori yang ada. Temuan ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut penulis ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai bagaimana pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan BI Rate terhadap NPF di BPRS.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap NPF pada BPR Syariah Di Indonesia Periode 2020-2025”**.

Banten Periode 2015-2018”, *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 143-151.

¹⁴ Rosela Palupi, dan Novia Efriyanti, “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”, *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 1212–1219.

¹⁵ Noviatul Fitriya, Mochamad Edman Syarief, dan Anhar Firdaus, “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia: Apakah Faktor Internal dan Faktor Eksternal Berpengaruh?”, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 44–53.

¹⁶ Najiatusun, et.al, “Analisis Variabel Makro ekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 24, No. 3, November 2019, hlm. 335-349.

¹⁷ Alfino Fadhlurrahman, Yoko Tristiarto, dan Ardhiani Fadila, “Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 2, 2021, hlm. 806–821.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap NPF pada BPR Syariah di Indonesia periode 2020-2025?
2. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar terhadap NPF pada BPR Syariah di Indonesia periode 2020-2025?
3. Bagaimana pengaruh BI Rate terhadap NPF pada BPR Syariah di Indonesia periode 2020-2025?
4. Bagaimana pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan BI Rate terhadap NPF pada BPR Syariah di Indonesia periode 2020-2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi terhadap NPF pada BPR Syariah di Indonesia periode 2020-2025?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Nilai Tukar terhadap NPF pada BPR Syariah di Indonesia periode 2020-2025?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh BI Rate terhadap NPF pada BPR Syariah di Indonesia periode 2020-2025?
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan BI Rate terhadap NPF pada BPR Syariah di Indonesia periode 2020-2025?

D. Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan BI Rate terhadap NPF pada BPR Syariah.

2. Praktisi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan BPR syariah di Indonesia dalam membuat keputusan pada tahun-tahun yang akan datang serta antisipasi terhadap faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BPR syariah di Indonesia.

3. Akademisi

Memungkinkan digunakan untuk jadi acuan referensi penelitian selanjutnya terkait variabel makro ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada BPR syariah.